

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Pengelolaan limbah cair tahu di Desa Kalisari dan Desa Kalikidang dilakukan melalui proses yang berbeda. Pengelolaan limbah cair tahu yang berbasis *collaborative governance* hanya terjadi di Desa Kalisari. Sementara proses yang berlangsung di Desa Kalikidang bukanlah pengelolaan limbah berbasis kolaborasi.

Proses *collaborative governance* di Desa Kalisari menunjukkan bahwa komunikasi tidak lagi berperan sebagai jantungnya kolaborasi. Negosiasi cenderung lebih banyak berperan dalam membangun kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama antar *stakeholder*. Sementara dengan tidak adanya proses negosiasi di Desa Kalikidang, kausalitas dari dialog *face-to-face* tidak secara langsung berimplikasi pada *trust-building* maupun komitmen *stakeholder* dan memunculkan nilai-nilai yang sebenarnya bukan nilai utama dari proses *collaborative*. Sehingga proses pengelolaan limbah cair tahu di Desa Kalikidang tidak berimplikasi pada aspek lainnya yang harus dipenuhi dalam proses *collaborative*. Oleh sebab itu maka proses yang berlangsung di Desa Kalikidang tidak dapat dikatakan sebagai proses *collaborative governance*.

Proses kolaborasi di Desa Kalisari dapat dikatakan berjalan dengan baik dan berhasil mengambil manfaat dari proses yang telah berlangsung. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah *starting condition*, sumberdaya manusia yang terlibat/*stakeholder*, *social capital*, dan *local leadership*. Keempat hal tersebut dapat mendukung keberhasilan proses kolaborasi namun juga dapat menghambat proses mencapai keberhasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *social capital* dan *local leadership* dapat dikatakan sebagai penentu keberlanjutan proses kolaborasi yang berimplikasi pada *outcome*. *Social capital* dan *local leadership* di setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda menghasilkan *proses collaborative* tertentu sehingga *outcome* pun menjadi tidak sama. Karakteristik masyarakat yang memiliki budaya terbuka dapat menjadikan proses *collaborative* sebagai *learning process* dan dapat *collaborative* memicu masyarakat/kelompok sebagai *co-produsen* dari barang publik. *Facilitative leadership* yang ditawarkan oleh Ansell and Gash (2007:554) sedikit berubah dalam studi kasus ini dimana konsep *leadership* yang justru muncul adalah *collaborative leadership*.

Social capital dan *local leadership* adalah hal penting dalam penelitian ini. Kedua hal tersebut menjadi asumsi bahwa ketika sebuah lokasi memiliki *social capital* yang terbuka dan mau belajar serta didukung dengan seorang *collaborative leadership* maka proses kolaboratif di lokasi tersebut akan berjalan dengan baik dan akan mampu memperoleh manfaat kolaborasi. Jika di sebuah lokasi hanya memiliki *social capital* yang terbuka dan mau belajar tanpa keterlibatan seorang *collaborative leadership* atau sebaliknya maka keberhasilan proses *collaborative* akan sulit tercapai. Sehingga *social capital* dan *collaborative leadership* merupakan komponen dalam *collaborative governance* yang tidak saling disubstitusikan.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian *collaborative governance* dalam pengelolaan limbah cair tahu yang telah dilakukan di Desa Kalisari dan Desa Kalikidang diketahui muncul beberapa hal terkait dengan pengembangan konsep, faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance*. Oleh sebab itu implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Implikasi Teoritik

Hasil penelitian proses *collaborative governance* pada pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa Kalisari dan Desa Kalikidang memunculkan variasi model proses kolaboratif yang berbeda dari model *collaborative governance* (Ansell and Gash,2007:550). *Collaborative governance* di Desa Kalisari adalah proses *collaborative* dari studi kasus pengelolaan limbah cair industri tahu. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dari studi kasus lainnya agar konsep *collaborative governance* dapat lebih berkembang.

2. Implikasi Praktis

- a. Pada proses dialog *face-to-face* perlu membedakan antara komunikasi dan negosiasi dengan aspek lain yaitu sosialisasi. Hal itu disebabkan karena aktifitas sosialisasi cenderung aktif dilakukan satu arah dari satu aktor yaitu pemerintah sementara kelompok sasaran cenderung pasif. Padahal tujuan dari dialog *face-to-face* dilakukan melalui komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah menempatkan *stakeholder* pada hubungan kemitraan seperti pada forum *deliberative* melalui proses negosiasi. Sehingga perlu ditekankan bahwa aspek yang utama perlu dibangun oleh pemerintah pada program-program berbasis kolaboratif menempatkan proses dialog *face-to-face* bukan hanya melalui komunikasi dan sosialisasi melainkan pada negosiasi. Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi tanpa negosiasi menjadikan tidak tercapainya nilai utama tujuan proses kolaboratif.
- b. Pentingnya peran sukarelawan sebagai salah satu SDM yang membantu efektifitas proses kolaborasi, maka adanya sukarelawan dalam program/kebijakan berbasis kolaboratif perlu diupayakan. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan memperluas tugas dan fungsi pokok

fasilitator Desa/Kelurahan atau aktor-aktor lain yang mampu menjangkau peranan sukarelawan dalam suatu program/kebijakan berbasis kolaboratif.

- c. Karakteristik masyarakat yang tidak sama disetiap lokasi menuntut adanya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan program/kebijakan berbasis kolaboratif. Untuk melihat pendekatan yang dianggap efektif pada karakteristik masyarakat tertentu Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan aktor-aktor lain seperti akademisi maupun lembaga-lembaga lain.
- d. Pentingnya pengaruh *local leadership* dalam membangun kemitraan baik secara *vertical* maupun *horizontal* mentut *local leadership* baik Lurah/Kepala Desa untuk mampu menciptakan *trust-building* melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang dianggap efektif.

